

Optimalisasi Desentralisasi Fiskal dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran di Daerah Tertinggal

Abdurahman¹, Ghafur Wibowo², Taufikur Rohman³

^{1,2,3}UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

e-mail: ³*taufik14oke@gmail.com

Abstract: *Structural unemployment remains a major development challenge in Indonesia's lagging regions due to inadequate infrastructure, low human capital quality, and limited productive investment. Within the framework of regional autonomy, fiscal decentralization is expected to serve as an instrument for job creation and equitable development. This study aims to analyze the optimization of fiscal decentralization in reducing unemployment in lagging regions. The research employs a qualitative descriptive approach using a systematic literature review of relevant academic journals, government reports, and empirical studies. The findings reveal that the effectiveness of fiscal decentralization in reducing unemployment is determined not only by the amount of fiscal transfers but also by the quality of governance, institutional capacity, and the allocation of expenditures toward productive sectors. The ineffectiveness of transfer fund management is largely influenced by the dominance of routine expenditures, weak labor market data-based planning, and limited multi-stakeholder collaboration. This study identifies five key optimization strategies: labor market data-driven planning, labor-intensive programs and vocational training, community-based rural economic development, multi-stakeholder partnerships, and strengthened institutional capacity and governance. Case studies from Bojonegoro, Kulon Progo, and Tanah Datar demonstrate that policy innovation and the utilization of local potential can enhance the effectiveness of fiscal decentralization in creating employment opportunities. Therefore, productive and accountable fiscal decentralization has significant potential to reduce unemployment and promote inclusive development in lagging regions.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Structural Unemployment, Lagging Regions, Village Fund, Inclusive Local Development*

Abstrak: Pengangguran struktural masih menjadi tantangan utama pembangunan di daerah tertinggal Indonesia akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta minimnya investasi produktif. Dalam konteks otonomi daerah, desentralisasi fiskal diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi desentralisasi fiskal dalam mengurangi tingkat pengangguran di daerah tertinggal. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui systematic literature review terhadap berbagai jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal dalam menurunkan pengangguran tidak hanya ditentukan oleh besarnya transfer fiskal, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan daerah, serta orientasi belanja pada sektor-sektor produktif. Ketidakefektifan pengelolaan dana transfer masih dipengaruhi oleh dominasi belanja rutin, lemahnya perencanaan berbasis data ketenagakerjaan, dan terbatasnya kemitraan multipihak. Penelitian ini mengidentifikasi lima strategi optimalisasi, yaitu perencanaan berbasis data ketenagakerjaan, penguatan program padat karya dan pelatihan vokasi, pengembangan ekonomi desa berbasis komunitas, pembangunan kemitraan multipihak, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola. Studi kasus di Bojonegoro, Kulon Progo, dan Tanah Datar menunjukkan bahwa inovasi kebijakan dan pemanfaatan potensi lokal mampu

meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal dalam menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, desentralisasi fiskal yang dikelola secara produktif dan akuntabel berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengurangi pengangguran dan mendorong pembangunan inklusif di daerah tertinggal.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pengangguran Struktural, Daerah Tertinggal, Dana Desa, Pembangunan Lokal Inklusif

1. Pendahuluan

Pengangguran struktural tetap menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertinggal yang menghadapi akumulasi hambatan struktural: infrastruktur yang tidak memadai, akses terbatas pada pendidikan dan layanan kesehatan, serta minimnya investasi di sektor-sektor produktif. Tingginya tingkat pengangguran berkorelasi langsung dengan meningkatnya kemiskinan dan penurunan daya beli masyarakat. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengangguran terbuka berdampak signifikan terhadap kemiskinan semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi kemiskinan (Saukani & Amaliah, 2023).

Konteks global juga memperkuat urgensi perhatian terhadap isu ini. Di Filipina, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi pengangguran karena terdapat keterputusan antara ekspansi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Grace Orcino, 2015). Kondisi serupa ditemukan di Nigeria, di mana pengangguran dan kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menegaskan pentingnya intervensi terarah dalam pendidikan dan penciptaan lapangan kerja (Anderu, 2021). Temuan dari berbagai konteks ini menegaskan bahwa pengangguran bukan sekadar masalah individual, melainkan hambatan sistemik bagi pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi fiskal merupakan instrumen utama yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan. Melalui transfer fiskal berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa, pemerintah pusat mendorong daerah merancang program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi positif terhadap pengurangan kemiskinan di berbagai provinsi (Ambya et al., 2019). Namun demikian, desentralisasi juga berpotensi memperlebar ketimpangan antarwilayah akibat perbedaan kapasitas fiskal antara daerah kaya dan miskin (Ashfahany et al., 2020).

Bukti empiris terbaru dari studi lintas negara oleh Akalbeo et al. (2023) dalam *European Journal of Political Economy* menunjukkan bahwa negara-negara dengan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran struktural yang lebih rendah. Temuan ini yang menggunakan panel data 52 negara antara 1991 dan 2012 memberikan justifikasi teoritis yang kuat bahwa desentralisasi fiskal yang dirancang dengan baik memiliki potensi nyata dalam menurunkan pengangguran struktural, bukan hanya pengangguran siklikal. Ini relevan dengan konteks daerah tertinggal Indonesia yang penganggurannya bersifat struktural, bukan semata-mata dampak siklus ekonomi.

Paradoks yang terjadi di Indonesia adalah meskipun alokasi transfer fiskal ke daerah terus meningkat Dana Desa saja telah mencapai Rp 68–72 triliun per tahun pada 2022–2023 (Kementerian Keuangan, 2023) dampaknya terhadap penurunan pengangguran di daerah tertinggal masih jauh dari harapan. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas perencanaan lokal, dominasi belanja rutin, serta keterbatasan dalam pengelolaan anggaran berbasis kebutuhan tenaga kerja. Evaluasi ulang strategi transfer fiskal dan penguatan tata kelola menjadi sangat mendesak (Pambudi, 2023).

Paradoks inilah yang menjadi inti persoalan (research gap) yang diangkat artikel ini: dengan alokasi anggaran yang demikian besar, mengapa pemerintah daerah masih gagal mendesain program penyerapan tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja lokal? Kegagalan ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan terletak pada besaran transfer fiskal, melainkan pada manajemen strategis pengelolaan keuangan daerah—mulai dari lemahnya perencanaan berbasis data, minimnya kapasitas manajerial aparatur, hingga tidak adanya model tata kelola yang mampu menerjemahkan dana transfer menjadi program kerja yang adaptif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif bagaimana desentralisasi fiskal dapat dioptimalkan untuk mengurangi pengangguran di daerah tertinggal. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya berhenti pada pembuktian dampak kuantitatif transfer fiskal terhadap kemiskinan atau ketimpangan wilayah (Ambya et al., 2019; Ashfahany et al., 2020; Qomariyah et al., 2016), artikel ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan kerangka tata kelola manajerial yang lebih komprehensif melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus multipihak, sehingga dapat menjelaskan *bagaimana* dan *mengapa* sebagian daerah berhasil mengonversi dana transfer menjadi lapangan kerja sementara mayoritas lainnya gagal melakukannya. Kontribusi utama artikel ini adalah: (1) mengintegrasikan bukti empiris lintas negara terbaru ke dalam konteks Indonesia; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penentu efektivitas kebijakan fiskal daerah; (3) menawarkan strategi konkret berbasis praktik terbaik dari studi kasus daerah-daerah berhasil di Indonesia; dan (4) memberikan rekomendasi kebijakan yang operasional dan terukur.

2. Kajian Pustaka

2.1 Desentralisasi Fiskal: Konsep dan Dimensi

Desentralisasi fiskal secara klasik dipahami sebagai proses pembagian kewenangan dan tanggung jawab fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan lokal (Bird et al., 1977; Musgrave & Musgrave, 1989). Dalam perspektif ekonomi publik, desentralisasi fiskal menjawab pertanyaan tentang tingkat pemerintahan mana yang paling efisien dalam menyediakan layanan publik tertentu.

Oates (1972) melalui Desentralization Theorem menyatakan bahwa penyediaan barang publik lokal akan lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dengan preferensi masyarakat setempat. Dalam konteks ketenagakerjaan, ini berarti bahwa program pemberdayaan tenaga kerja yang dirancang oleh pemerintah daerah dengan pemahaman mendalam tentang potensi ekonomi dan karakteristik tenaga kerja lokal berpotensi lebih efektif dibanding program yang dirancang secara top-down dari pusat.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dioperasionalkan melalui empat komponen utama: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi daerah; (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai transfer umum untuk pemerataan kemampuan fiskal; (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membiayai urusan tertentu yang menjadi prioritas nasional; dan (4) Dana Desa yang langsung disalurkan ke pemerintah desa. Kerangka hukum ini diperkuat melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang memperkuat local taxing power dan harmonisasi belanja.

Memahami desentralisasi fiskal semata dari sisi besaran transfer tidak cukup untuk menjelaskan mengapa hasilnya berbeda-beda antardaerah. Diperlukan perspektif Manajemen Keuangan Daerah, yaitu bagaimana pemerintah daerah secara manajerial menyusun, mengalokasikan, dan mengendalikan belanja agar selaras dengan prioritas pembangunan. Salah satu indikator kunci dalam perspektif ini adalah komposisi belanja modal (capital expenditure) versus belanja rutin/operasional (recurrent expenditure): belanja modal yang produktif seperti infrastruktur ekonomi, pelatihan kerja, dan dukungan UMKM memiliki daya ungkit (multiplier effect) yang jauh lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja dibandingkan belanja rutin yang sebagian besar terserap untuk gaji pegawai dan operasional administratif. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kapasitas manajerial daerah dalam mendesain struktur belanja yang berorientasi hasil (outcome-oriented), bukan sekadar pada besaran dana yang diterima.

Kerangka Public Governance dan gagasan Entrepreneurial Government dari Osborne & Gaebler (1992) memberikan lensa analitis yang relevan untuk membaca fenomena ini. Osborne & Gaebler berargumen bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang “mengarahkan, bukan mendayung” (steers rather than rows) yakni berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang memberdayakan komunitas dan mitra lokal, berorientasi pada hasil (outcome) bukan sekadar input anggaran, serta berani berinovasi dan mengambil risiko terukur dalam merancang program publik. Prinsip-prinsip ini relevan untuk membaca kasus Kulon Progo (Bela Beli Kulon Progo) dan Bojonegoro, di mana keberhasilan bukan semata hasil dari besarnya dana yang

dikurcikan, melainkan dari kepemimpinan daerah yang mengambil peran kewirausahaan (entrepreneurial) dalam menggerakkan kolaborasi multipihak, membangun ekosistem ekonomi lokal, dan mendesain insentif kebijakan yang adaptif terhadap potensi daerah masing-masing.

2.2 Pengangguran di Daerah Tertinggal: Karakteristik dan Dimensi

Pengangguran di daerah tertinggal memiliki karakter struktural yang berbeda dibandingkan dengan daerah maju karena tidak hanya dipengaruhi oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar. Pengangguran struktural muncul ketika tenaga kerja tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi yang berkembang, sementara sektor-sektor potensial di daerah juga sering mengalami hambatan akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya investasi, akses pasar yang sempit, serta lemahnya dukungan kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan proses penyerapan tenaga kerja berjalan lambat dan memperbesar ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Akalbeo et al. (2023) secara empiris membedakan pengangguran struktural dari pengangguran siklikal dan menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi pengangguran struktural. Temuan ini menunjukkan bahwa kewenangan fiskal daerah lebih efektif ketika diarahkan untuk mengatasi persoalan mendasar pasar kerja, seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pengembangan sektor ekonomi lokal, dan perbaikan infrastruktur pendukung, dibandingkan hanya merespons fluktuasi ekonomi jangka pendek.

Di daerah tertinggal Indonesia, pengangguran struktural diperburuk oleh: rendahnya investasi swasta akibat minimnya infrastruktur dasar, dominasi sektor pertanian tradisional yang padat tenaga kerja tidak terampil, keterbatasan akses pendidikan vokasi yang relevan, serta migrasi tenaga kerja terdidik ke kota besar (brain drain). Kondisi ini menciptakan perangkap kemiskinan struktural yang sulit diatasi tanpa intervensi kebijakan yang terarah dan berbasis lokal.

2.3 Hubungan Teoritis dan Empiris Desentralisasi Fiskal dengan Pengangguran

Mekanisme transmisi antara desentralisasi fiskal dan pengangguran dapat dijelaskan melalui beberapa jalur. Pertama, desentralisasi fiskal meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk berinvestasi dalam infrastruktur produktif (jalan, irigasi, pasar) yang secara langsung menciptakan lapangan kerja dan menurunkan biaya produksi bagi sektor swasta. Kedua, transfer fiskal yang diarahkan pada pelatihan kerja dan pengembangan UMKM meningkatkan kesesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan pasar lokal. Ketiga, pengembangan kapasitas fiskal daerah mendorong inovasi kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif terhadap dinamika pasar kerja lokal.

Secara empiris studi Akalbeo et al. (2023) menggunakan pendekatan variabel instrumental pada panel 52 negara membuktikan bahwa desentralisasi fiskal yang lebih tinggi berkorelasi negatif dengan tingkat pengangguran struktural. Di tingkat nasional, penelitian untuk konteks Indonesia menemukan bahwa alokasi dana desa yang produktif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menciptakan lapangan kerja (Ambya et al., 2019; Qomariyah et al., 2016). Studi terbaru Kurniawan et al. (2025) juga menunjukkan bahwa fiskal desentralisasi berdampak pada pergeseran sektoral dan ketimpangan di tingkat kabupaten/kota.

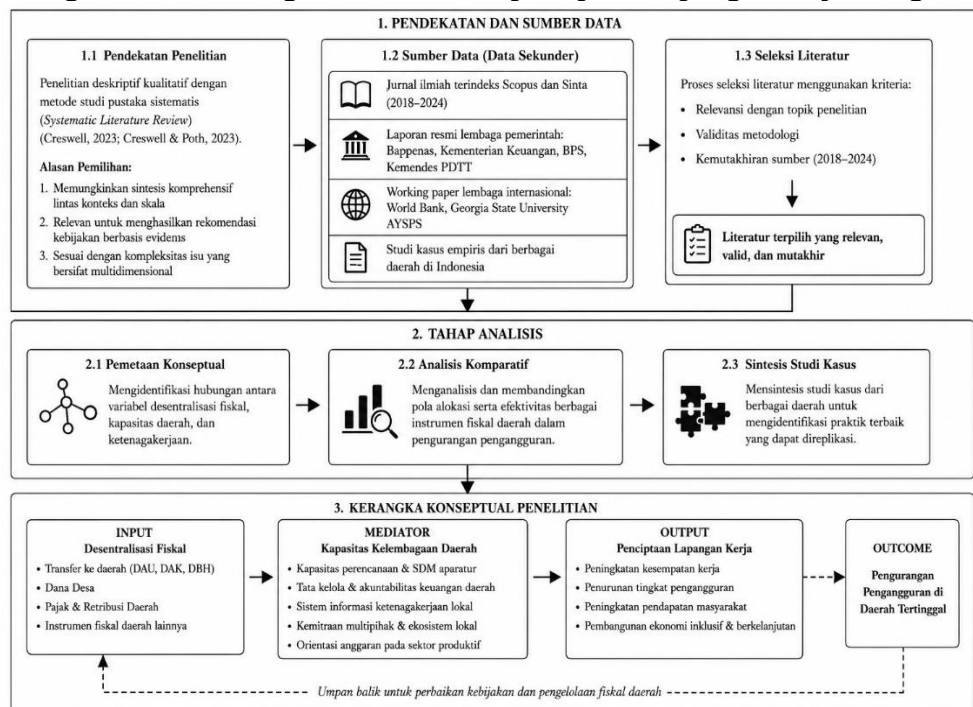
3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif berganda (multiple-case studies) untuk menganalisis bagaimana desentralisasi fiskal dapat dioptimalkan dalam konteks pengurangan pengangguran di daerah tertinggal (Yin, 2009). Studi pustaka digunakan sebagai metode pengumpulan data sekunder yang melandasi pemetaan konseptual, sedangkan tiga kasus daerah (Bojonegoro, Kulon Progo, dan Tanah Datar) dianalisis secara komparatif untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan praktik manajerial antardaerah (Creswell, 2023; Creswell & Poth, 2023). Pendekatan ini dipilih karena: (1) memungkinkan sintesis komprehensif lintas konteks dan skala; (2) relevan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis evidens; dan (3) sesuai dengan kompleksitas isu yang bersifat multidimensional.

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder yang meliputi jurnal ilmiah terindeks Scopus dan Sinta periode 2018–2024, laporan resmi lembaga pemerintah seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, dan Kemendes PDTT, *working paper* lembaga internasional seperti World Bank dan Georgia State University AYSPS, serta berbagai studi kasus empiris dari daerah di Indonesia. Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan tingkat relevansi terhadap topik penelitian, validitas metodologi yang digunakan, serta kemutakhiran sumber agar data yang digunakan memiliki kualitas akademik dan daya dukung analisis yang kuat. Ketiga lokus studi kasus Kabupaten Bojonegoro, Kulon Progo, dan Tanah Datar dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan tiga kriteria: (1) tersedia dokumentasi program dan evaluasi yang memadai di literatur akademik maupun laporan resmi pemerintah daerah; (2) merepresentasikan model inovasi fiskal yang berbeda satu sama lain (integrasi CSR-Dana Desa, ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, dan pariwisata budaya berbasis komunitas); dan (3) memiliki indikasi keberhasilan dalam penyerapan tenaga kerja lokal yang terdokumentasi pada periode 2018–2024. Pemilihan berbasis kriteria ini memungkinkan replikasi logis (*replication logic*) dalam analisis lintas kasus, sebagaimana dianjurkan dalam desain studi kasus berganda (Yin, 2009).

Analisis penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, pemetaan konseptual untuk mengidentifikasi hubungan antara desentralisasi fiskal, kapasitas kelembagaan daerah, dan ketenagakerjaan. Kedua, analisis komparatif terhadap pola alokasi serta efektivitas berbagai instrumen fiskal daerah dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. Ketiga, sintesis studi kasus untuk mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat direplikasi di daerah lain. Kerangka konseptual penelitian memposisikan desentralisasi fiskal sebagai *input*, kapasitas kelembagaan daerah sebagai variabel mediator, dan penciptaan lapangan kerja sebagai *output*, sehingga memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap efektivitas kebijakan fiskal dalam mengurangi pengangguran.

Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian: desentralisasi fiskal sebagai input, kapasitas kelembagaan daerah sebagai mediator, dan penciptaan lapangan kerja sebagai output



4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Realitas Pengelolaan Fiskal di Daerah Tertinggal

Daerah tertinggal di Indonesia menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat, dengan proporsi transfer dalam total APBD yang mencapai 70–90% di banyak kabupaten tertinggal. Ketergantungan ini disebabkan oleh rendahnya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mobilisasi sumber daya fiskal mandiri. Penelitian di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang rendah diperkuat oleh ketergantungan hampir penuh pada dana pusat (Marlissa & Blesia, 2018).

Data Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 65 Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah di kawasan timur Indonesia termasuk Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih dikategorikan memiliki kapasitas fiskal 'sangat rendah'. Ini berarti kemampuan mereka untuk mengkompensasi pengurangan transfer pusat dengan PAD sangat terbatas, menciptakan kerentanan fiskal yang tinggi. Studi terbaru memperingatkan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berisiko memicu kenaikan pengangguran dan memperparah ketimpangan di daerah-daerah tersebut (idea, 2025).

Permasalahan mendasar lainnya adalah orientasi belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasional dan pegawai, bukan belanja modal dan investasi produktif. Di Jawa Tengah, lebih dari 85% kabupaten sangat bergantung pada transfer pusat, mencerminkan lemahnya PAD dan pola belanja yang kurang efisien (Ariyanto et al., 2021). Situasi ini menegaskan adanya kesenjangan antara potensi desentralisasi fiskal dan realisasi dampaknya terhadap pembangunan ekonomi lokal.

4.2 Ketidakefektifan Penggunaan Dana Transfer

Masalah mendasar dalam manajemen fiskal daerah tertinggal adalah alokasi dana transfer yang tidak tepat sasaran. Alih-alih diarahkan ke sektor produktif seperti pertanian, UMKM, infrastruktur desa, dan pariwisata, banyak anggaran tersedot untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau proyek fisik jangka pendek tanpa dampak berkelanjutan terhadap penciptaan lapangan kerja (Qomariyah et al., 2018). Ketergantungan pada bantuan pusat juga melemahkan kapasitas pembiayaan lokal karena kurangnya kesesuaian antara bantuan dan prioritas pembangunan daerah (Agbonyitor, 1998).

Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa efektivitas belanja modal pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja sering kali terhambat oleh lemahnya kapasitas perencanaan pembangunan. Pendekatan *top-down* dalam penyusunan anggaran menyebabkan program yang dijalankan kurang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi lokal, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas (Keban, 2019). Selain itu keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur perencana daerah serta belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan yang andal menyebabkan proses alokasi anggaran belum sepenuhnya berbasis data aktual dan kebutuhan riil masyarakat. Akibatnya, kebijakan fiskal daerah cenderung kurang tepat sasaran dan belum optimal dalam mendorong pembangunan ekonomi produktif maupun pengurangan pengangguran (Djafar et al., 2025).

Onofrei et al. (2023) dalam studi komparatif internasional menemukan bahwa inefisiensi alokasi anggaran dan hambatan operasional di tingkat daerah menjadi penghalang utama realisasi potensi desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kinerja ekonomi lokal. Temuan ini konsisten dengan kondisi di Indonesia, di mana banyak daerah mengutamakan sektor yang memiliki efek pengganda rendah terhadap penciptaan kerja dibanding sektor pariwisata, komunikasi, dan industri padat karya (Ariyanto et al., 2021).

Dimensi tata kelola juga menjadi faktor penting. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang lemah membuka peluang inefisiensi dan bahkan penyimpangan. Reformulasi strategi pengelolaan dana desentralisasi menjadi krusial untuk mendukung pembangunan inklusif dan mengurangi pengangguran (Anggraeni et al., 2022). Penguatan pengawasan berbasis komunitas dan sistem informasi keuangan daerah yang transparan merupakan prasyarat efektivitas desentralisasi fiskal.

4.3 Strategi Optimalisasi Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan sintesis bukti empiris dan praktik terbaik dari berbagai daerah, terdapat lima strategi utama yang dapat diimplementasikan untuk mengoptimalkan desentralisasi fiskal dalam mengurangi pengangguran di daerah tertinggal:

4.3.1 Strategi 1: Perencanaan Berbasis Data Ketenagakerjaan

Pemerintah daerah perlu membangun sistem informasi ketenagakerjaan yang mutakhir dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Sistem ini mencakup data mengenai profil angkatan kerja, tingkat pendidikan, keterampilan, penyebaran geografis pengangguran, serta pemetaan sektor ekonomi potensial yang mampu menyerap tenaga kerja. Dengan pendekatan berbasis data, alokasi anggaran daerah dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja, bukan semata-mata atas dasar kebiasaan administratif atau tekanan politik. Pendekatan ini juga memungkinkan pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal secara lebih terukur dalam menciptakan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran, sehingga intervensi pembangunan menjadi lebih efisien, adaptif, dan berorientasi pada hasil (Bartik, 2020; Belitung, 2019; Nurhidayah et al., 2025; Schiavina et al., 2022; Timur, 2026).

4.3.2 Strategi 2: Prioritas Program Padat Karya dan Pelatihan Vokasi

Daerah perlu memprioritaskan program padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja tidak terampil secara langsung melalui pembangunan infrastruktur desa berbasis swakelola, seperti jalan, irigasi, dan pasar desa. Selain meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi lokal, pendekatan ini juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, terutama kelompok penganggur dan rentan. Sesuai Permendesa PDPTT No. 8 Tahun 2022, minimal 50% anggaran Dana Desa untuk program fisik dialokasikan sebagai upah kerja agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, pelatihan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan industri dan potensi ekonomi lokal sehingga mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil, relevan, dan lebih mudah terserap di pasar kerja (Huruta, 2016; Qomariyah et al., 2016).

4.3.3 Strategi 3: Penguatan Ekonomi Desa Berbasis Komunitas

Dana Desa perlu diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis komunitas yang mampu menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja berkelanjutan di desa. Pengembangan usaha ternak kolektif, pertanian organik, kerajinan tangan, dan agrowisata dapat diperkuat melalui pembentukan kelompok usaha bersama maupun optimalisasi peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal. Pendekatan ini mendorong pemanfaatan potensi desa secara lebih produktif, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa BUMDes yang dikelola secara profesional dan partisipatif mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan, meskipun hanya sebagian kecil BUMDes yang mencapai tingkat keberhasilan optimal (Kementerian Keuangan, 2023).

4.3.4 Strategi 4: Kemitraan Multipihak dan Ekosistem Ekonomi Lokal

Desentralisasi fiskal akan lebih efektif apabila didukung melalui kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan potensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri melalui program magang, pelatihan kerja, rekrutmen berbasis komunitas, serta pemberian insentif investasi di daerah tertinggal. Selain itu BUMDes dapat dikembangkan sebagai agregator produk lokal dan mitra distribusi yang membantu memperluas akses pasar bagi usaha masyarakat desa. Sinergi multipihak ini tidak hanya memperkuat kapasitas ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan peluang kerja, investasi produktif, dan daya saing daerah secara berkelanjutan (Anas, 2025; Bank, 2010; Idris, 2026; Kline & Moretti, 2014; Kurowski & Eze-Ajoku, 2024).

4.3.5 Strategi 5: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Kelola

Efektivitas desentralisasi fiskal pada dasarnya sangat bergantung pada kualitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur perencana, penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), serta penguatan sistem pengawasan internal menjadi investasi kelembagaan yang penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, transparan,

dan tepat sasaran. Tata kelola keuangan daerah yang akuntabel tidak hanya meningkatkan efisiensi belanja publik, tetapi juga memperbesar peluang terciptanya distribusi sumber daya yang lebih merata dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aryaputra et al., 2022).

4.4 Praktik Terbaik dari Daerah di Indonesia

Beberapa daerah di Indonesia telah menunjukkan bagaimana desentralisasi fiskal yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak nyata terhadap ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

4.4.1 Kabupaten Bojonegoro Model Integrasi CSR dan Dana Desa

Program Desa Produktif di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan keberhasilan integrasi Dana Desa dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan migas yang beroperasi di daerah tersebut dalam mendukung pelatihan kerja dan pengembangan usaha lokal. Sinergi ini mampu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan keterampilan, pengembangan usaha produktif, dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal. Dampaknya terlihat pada penurunan tingkat pengangguran perdesaan serta peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata (Mufa'idah, 2018). Model Bojonegoro membuktikan bahwa kolaborasi antara Dana Desa dan sumber pendanaan eksternal dapat melipatgandakan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.

4.4.2 Kabupaten Kulon Progo Model Ekonomi Kerakyatan Terintegrasi

Program *Bela Beli Kulon Progo* di Kulon Progo menjadi contoh pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal melalui penciptaan ekosistem ekonomi yang terintegrasi. Program ini mendorong penggunaan produk lokal secara sistematis, baik dalam pengadaan pemerintah maupun pola konsumsi masyarakat, sehingga mampu memperkuat permintaan terhadap produk UMKM daerah. Dukungan berupa pelatihan usaha, akses permodalan, dan alokasi anggaran daerah turut meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha lokal. Kombinasi kebijakan tersebut terbukti tidak hanya memperkuat ekonomi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih berkelanjutan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah (Wicaksono, 2022).

4.4.3 Kabupaten Tanah Datar Model Pariwisata Budaya Berbasis Nagari

Program *One Nagari One Event* di Tanah Datar memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan pariwisata budaya berbasis kekuatan tradisi lokal Minangkabau. Melalui penyelenggaraan kegiatan budaya di setiap nagari, program ini tidak hanya menjaga kelestarian budaya daerah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata, kerajinan, dan kuliner lokal. Pendekatan berbasis komunitas tersebut berhasil membuka peluang kerja bagi pemuda dan perempuan, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, serta memperkuat identitas budaya sebagai sumber pembangunan ekonomi berkelanjutan (Feby Hidayat et al., 2023). Pengalaman Tanah Datar membuktikan bahwa identitas budaya lokal dapat menjadi aset ekonomi yang produktif jika didukung oleh alokasi fiskal yang tepat.

Ketiga studi kasus tersebut menunjukkan benang merah yang sama, yaitu bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, melainkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merancang strategi pemanfaatan dana yang inovatif, berbasis potensi lokal, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Kepemimpinan daerah yang visioner juga menjadi faktor penting dalam mendorong sinergi antaraktor dan memastikan program berjalan secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumentasi teoritis bahwa kualitas tata kelola dan efektivitas pengelolaan kebijakan memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan sekadar besarnya transfer fiskal yang diterima daerah.

Untuk mengonkretkan benang merah tersebut, Tabel 1 menyajikan matriks komparasi manajerial ketiga daerah pada empat aspek: kepemimpinan strategis, sumber daya fiskal yang digunakan, inovasi program, serta mekanisme penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1. Matriks komparasi manajerial tiga daerah dalam mengoptimalkan desentralisasi fiskal (diolah dari Mufa'idah, 2018; Wicaksono, 2022; Feby Hidayat et al., 2023)

Aspek	Bojonegoro	Kulon Progo	Tanah Datar
Kepemimpinan Strategis	Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan migas (CSR)	Menggerakkan ekonomi kerakyatan lewat kebijakan afirmatif lokal	Memobilisasi identitas budaya nagari sebagai aset pembangunan
Sumber Daya Fiskal	Dana Desa dipadukan dengan dana CSR perusahaan migas	APBD untuk pelatihan usaha dan akses permodalan UMKM	Dana Desa untuk penyelenggaraan event budaya tahunan per nagari
Inovasi Program	Desa Produktif: integrasi pelatihan kerja lintas sektor publik-swasta	Bela Beli Kulon Progo: preferensi sistemik terhadap produk lokal	One Nagari One Event: pariwisata budaya berbasis komunitas
Mekanisme Penyerapan Tenaga Kerja	Penyerapan langsung melalui pelatihan kerja dan usaha produktif berbasis migas	Penyerapan melalui penguatan UMKM dan rantai pasok lokal	Penyerapan musiman/event bagi pemuda dan perempuan di sektor kreatif-pariwisata

Matriks ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga daerah menempuh jalur inovasi yang berbeda, terdapat satu logika manajerial yang konsisten: dana transfer fiskal hanya menjadi modal awal (enabling capital), sementara hasil akhir berupa penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh bagaimana kepemimpinan daerah mengonversi modal tersebut menjadi kemitraan, inovasi program, dan mekanisme penyerapan yang sesuai dengan potensi lokal. Berdasarkan sintesis ini, penelitian mengusulkan sebuah konsep orisinal yang disebut *Local Capacity Optimization Framework* (LCOF) dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu kerangka manajerial yang memandang efektivitas desentralisasi fiskal sebagai fungsi dari interaksi tiga kapasitas daerah: (1) kapasitas kepemimpinan strategis untuk membangun kemitraan dan mengambil risiko terukur sebagaimana dimaksud dalam gagasan entrepreneurial government (Osborne & Gaebler, 1992); (2) kapasitas manajerial fiskal untuk mengalokasikan belanja secara produktif dan berbasis data ketenagakerjaan; serta (3) kapasitas inovasi program untuk menerjemahkan potensi lokal baik sumber daya alam, ekonomi rakyat, maupun modal budaya menjadi mekanisme penyerapan tenaga kerja yang kontekstual. Ketiadaan salah satu kapasitas ini, sebagaimana terlihat pada daerah-daerah dengan ketergantungan fiskal tinggi namun tanpa inovasi manajerial (lihat bagian Realitas Pengelolaan Fiskal di Daerah Tertinggal), menjelaskan mengapa volume transfer yang besar tidak otomatis berkonversi menjadi penurunan pengangguran.

5. Kesimpulan

Desentralisasi fiskal memiliki potensi besar sebagai instrumen pengurangan pengangguran di daerah tertinggal, sebagaimana dibuktikan secara teoretis maupun empiris melalui berbagai studi internasional dan nasional. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak hanya bergantung pada besarnya transfer dana ke daerah, melainkan sangat ditentukan oleh kualitas ekosistem kelembagaan yang mendukungnya, seperti kapasitas perencanaan pemerintah daerah, kualitas tata kelola dan pengawasan anggaran, orientasi belanja pada sektor-sektor produktif, serta kemampuan membangun kolaborasi multipihak yang mampu menghubungkan kebijakan fiskal dengan kebutuhan riil masyarakat dan pasar kerja lokal.

Artikel ini menemukan bahwa ketidakefektifan desentralisasi fiskal dalam mengurangi pengangguran di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu dominasi belanja rutin dibandingkan belanja produktif, lemahnya sistem informasi ketenagakerjaan lokal sebagai dasar perencanaan kebijakan, keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan, serta masih minimnya kemitraan multipihak dalam membangun ekosistem ekonomi lokal. Kondisi tersebut menyebabkan transfer fiskal belum sepenuhnya mampu

mendorong penciptaan lapangan kerja secara optimal dan berkelanjutan. Namun demikian, studi kasus di Bojonegoro, Kulon Progo, dan Tanah Datar menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut dapat diatasi melalui inovasi kebijakan, kepemimpinan daerah yang visioner, penguatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan dana yang berorientasi pada potensi dan kebutuhan lokal.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal yang dioptimalkan bukan sekadar ditingkatkan volumenya memiliki kapasitas besar untuk menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan di daerah tertinggal. Optimalisasi tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang lebih produktif, tata kelola yang akuntabel, serta kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Jika dijalankan secara tepat, desentralisasi fiskal tidak hanya mampu mengurangi pengangguran dan ketimpangan pembangunan antarwilayah, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

5.1 Implikasi Manajerial dan Kontribusi Teoretis

Secara teoretis artikel ini berkontribusi pada perkembangan ilmu manajemen publik dengan menawarkan kerangka Local Capacity Optimization Framework (LCOF) yang menjembatani teori desentralisasi fiskal klasik dengan perspektif Manajemen Keuangan Daerah dan Entrepreneurial Government. Kerangka ini menggeser fokus analisis dari “berapa besar dana yang ditransfer” menjadi “bagaimana kapasitas kepemimpinan, manajerial fiskal, dan inovasi program berinteraksi dalam mengonversi dana menjadi lapangan kerja”, sehingga memperkaya perdebatan literatur mengenai determinan efektivitas desentralisasi fiskal di luar variabel kuantitatif transfer dana semata.

Secara praktis temuan ini berimplikasi pada perlunya pemerintah daerah tertinggal mereorientasi tiga hal: pertama, membangun sistem informasi ketenagakerjaan sebagai basis perencanaan anggaran; kedua, mengalihkan komposisi belanja dari belanja rutin menuju belanja modal produktif yang terukur dampaknya terhadap penyerapan kerja; dan ketiga, mengembangkan kapasitas kepemimpinan entrepreneurial yang mampu menjalin kemitraan multipihak. Pemerintah pusat dan lembaga pembina daerah juga perlu mempertimbangkan insentif berbasis kinerja (performance-based incentives) bagi daerah yang menunjukkan inovasi manajerial dalam pemanfaatan dana transfer, alih-alih hanya berbasis formula alokasi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain studi kasus komparatif berganda yang digunakan mengandalkan data sekunder dari literatur dan laporan resmi, tanpa wawancara langsung atau observasi lapangan terhadap aktor-aktor di Bojonegoro, Kulon Progo, dan Tanah Datar, sehingga generalisasi analitis (analytical generalization) yang dihasilkan perlu diuji lebih lanjut melalui data primer. Kedua, ketiga kasus yang dipilih merupakan daerah dengan praktik relatif berhasil (best practices), sehingga kerangka LCOF yang diusulkan belum diuji pada daerah dengan tingkat kegagalan tinggi untuk melihat apakah ketiadaan ketiga kapasitas tersebut benar-benar menjadi penyebab utama ketidakefektifan. Ketiga, perbedaan karakteristik geografis, sumber daya alam, dan struktur sosial-budaya antardaerah membatasi generalisasi temuan secara langsung ke seluruh daerah tertinggal di Indonesia yang sangat heterogen.

5.3 Saran untuk Penelitian Mendatang

Penelitian mendatang disarankan untuk: (1) menguji kerangka Local Capacity Optimization Framework secara empiris-kuantitatif, misalnya melalui survei lintas-kabupaten untuk mengukur hubungan antara tiga dimensi kapasitas (kepemimpinan, manajerial fiskal, inovasi program) dengan indikator penyerapan tenaga kerja; (2) melengkapi data sekunder dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan pada lokus studi kasus untuk memperkuat validitas konstruk; (3) memperluas studi kasus pada daerah tertinggal dengan tingkat keberhasilan rendah sebagai kasus pembandingan (negative case), guna menguji daya jelas (explanatory power) kerangka LCOF secara lebih ketat; dan (4) mengeksplorasi peran teknologi digital dan sistem informasi ketenagakerjaan berbasis data real-time dalam memperkuat kapasitas manajerial fiskal daerah.

Daftar Pustaka

- Akalbeo, B., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2023). Fiscal decentralization and structural versus cyclical unemployment levels. *European Journal of Political Economy*, 80, 102477. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2023.102477>
- Ambya, Nairobi, & Rizqiandri, M. (2019). The Alleviation of Allocation Funding and Rural Poverty in Indonesia. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, 2(2), 123–136. <https://doi.org/10.23960/IJEBE.V2I2.57>
- Anas, A. (2025). Peran Koperasi dan BUMDes dalam Meningkatkan Efisiensi Distribusi Pangan. *J-ESA: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/6487>
- Anderu, K. S. (2021). An empirical nexus between poverty and unemployment on economic growth. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 9(1), 85–94. <https://doi.org/10.22437/ppd.v9i1.12005>
- Anggraeni, R. M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2022). Fiscal Decentralization and its Effect on Poverty Alleviation: Case Study of Indonesia. *Bulletin of Islamic Economics*, 1(2), 35–48. <https://doi.org/10.14421/BIE.2022.012-04>
- Ariyanto, B., Ahmad, A. A., Suharno, S., & Arsil, P. (2021). Does high transfer from the central government to the local government guarantee high economic growth? Evidence from Central Java Province. *Icore*, 5(1), 577–582. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/Icore/article/view/1523>
- Aryaputra, A., Pratiwi, F., & Aryasatya, I. R. (2022). TRANSFER PEMERINTAH PUSAT SEBAGAI WUJUD DESENTRALISI FISKAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH SEBAGAI BENTUK UPAYA MENGATASI KETIMPANGAN PENDAPATAN, EFEKTIF ATAU TIDAK? *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 111–118. <https://doi.org/10.30996/JEB17.V7I02.7361>
- Ashfahany, A. El, Fazrina Djuuna, R., & Rofiq, N. F. (2020). Does Fiscal Decentralization Increases Regional Income Inequality in Indonesia? 2. <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/equij>
- Bank, W. (2010). *Laporan Ketenagakerjaan di Indonesia*. World Bank. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/180971468040514780/pdf/563480WP0Indon110Full0version0FINAL.pdf>
- Bartik, T. J. (2020). *Bringing Jobs to People: Improving Local Economic Development Policies*. W.E. Upjohn Institute for Employment Research. https://research.upjohn.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=up_policypapers
- Belitung, B. P. K. B. (2019). *Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah*. <https://bappeda.babelprov.go.id/content/sinkronisasi-perencanaan-dan-penganggaran-pembangunan-daerah>
- Bird, R. M., Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1977). Public Finance in Theory and Practice. *The Canadian Journal of Economics*, 10(3), 524. <https://doi.org/10.2307/134487>
- Creswell, J. W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 552. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Djafar, F., Akibu, R. S., & Moputi, N. (2025). Orchestration of Regional Government Organization Capacity to Strengthen Public Aspiration-Oriented Development Planning. *Journal La Sociale*, 6(6), 1953–1970.
- Feby Hidayat, Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). “Satu Nagari Satu Event” Sebuah Upaya Untuk Kemajuan Kabupaten Tanah Datar. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 115–124. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.12875>
- Grace Orcino, L. N. (2015). *Jobs, Poverty and Economic Growth: The Case of Region I in the Philippines* (Vol. 5, Number 10). www.iiste.org
- Huruta, A. D. (2016). Pengaruh transfer fiskal terhadap ketimpangan wilayah di Kabupaten Sumba Timur. *Kritis*, 24(1), 59–75. <https://doi.org/10.24246/kritis.v24i1p59-75>

- idea. (2025). *Sinyal Resentralisasi Fiskal: Desentralisasi yang Kian Menyempit – Perkumpulan Idea*. <https://perkumpulanidea.org/en/2025/11/13/sinyal-resentralisasi-fiskal-desentralisasi-yang-kian-menyempit/>
- Idris. (2026). Peran Strategis BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Journal of Applied Business and Banking (JABB)*. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JABB/article/view/38481>
- Keban, Y. T. (2019). The Complexities of Regional Development Planning Reform: The Indonesian Case. *Policy & Governance Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.30589/PGR.V3I1.124>
- Kementerian Keuangan. (2023). *Efektivitas Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id>
- Kline, P., & Moretti, E. (2014). People, Places, and Public Policy: Some Simple Welfare Economics of Local Economic Development. *Annual Review of Economics*. https://eml.berkeley.edu/~pkline/papers/KM_ARE_2014.pdf
- Kurniawan, M., Noviarita, H., Anriyani, Y., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DAN PERGESERAN SEKTORAL TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH AREA SUMBAGSEL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2015-2023. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 9(2). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/16927>
- Kurowski, C., & Eze-Ajoku, C. (2024). Digital Tools for Boosting the Impact of Fiscal Decentralization in Africa's Local Economies. *PMC / NCBI*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11170072/>
- Marlissa, E. R., & Blesia, J. U. (2018). Fiscal dependence in a special autonomy region: evidence from a local government in eastern Indonesia. *Journal of Economic Development, Environment and People*, 7(1), 55–72. <https://doi.org/10.26458/JEDEP.V7I1.574>
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice Fifth Edition*. *Economists' Voice*, 9(2), 650. https://books.google.com/books/about/Public_Finance_in_Theory_and_Practice.html?hl=id&id=s_9EAAAAYAAJ
- Nurhidayah, V. D., Yamardi, Y., & Sukmapryandhika, D. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Data Ketenagakerjaan dan Pelatihan Terintegrasi dalam Mengatasi Pengangguran di Kota Cimahi. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/praxis-idealist/article/view/2673>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. <https://archive.org/details/fiscalfederalism0000oate>
- Osborne, D., & Gaebler, T. A. (1992). *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. https://books.google.co.id/books/about/Reinventing_Government.html?id=IMKGAAAAAAAJ&redir_esc=y
- Pambudi, A. S. (2023). Evaluation of government funding support for national priority development related to the environmental sector in regions. *Indonesian Journal of Applied Environmental Studies*, 4(1), 10–21. <https://doi.org/10.33751/injast.v4i1.7283>
- Qomariyah, N., Qomariyah, N., Suharno, S., & Priyarsono, D. S. (2016). DAMPAK TRANSFER FISKAL DAN BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN SEKTORAL, KETIMPANGAN DAN KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 5(2), 45–67. <https://doi.org/10.29244/jekp.5.2.2016.45-67>
- Saukani, R., & Amaliah, I. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan di Indonesia pada Tahun 2019–2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 3(1), 190–198.
- Schiavina, M., Melchiorri, M., Freire, S., Florio, P., Ehrlich, D., Tommasi, P., & Pesaresi, M. (2022). Occupations on the map: Using a super learner algorithm to downscale labor statistics. *PLOS ONE*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9728836/>

- Timur, S. (2026). *Dari Data ke Kebijakan: Kontribusi Data Real-Time dalam Membangun Ketahanan Fiskal*. <https://www.serangtimur.co.id/2026/05/dari-data-ke-kebijakan-kontribusi-data.html>
- Wicaksono, A. (2022). Program Bela Beli Kulon Progo dan penguatan UMKM lokal. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://eprints.ipdn.ac.id/11635/>
- Yin, R. K. (2009). *Case study research: Design and methods* (Vol. 5). sage.